

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan pada akhirnya akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat. Di dalam kerangka itu, pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian

proses pertumbuhan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini, di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menyolok sekali, bahwa lebih dari separuh jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Salah satu tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian Daerah terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, semakin

besar pula diskresi (keleluasaan) daerah untuk menggunakan PAD sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung-jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut UU N0.33 tahun 2004 sumber-sumber pendapatan antara Lain:

1. Komponen-komponen pembentuk PAD terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
2. Pendapatan asli daerah berasal dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Melihat realita pencapaian PAD dan persentasenya terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih kecil, maka tujuan mulia dari otonomi daerah nampaknya belum dapat terwujud. Hal ini ditunjukkan dalam table di bawah ini:

Tabel 1.1

**Target Pendapatan Asli Daerah Antara Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2009-2011**

Kabupaten/Kota	Target PAD		
	2009	2010	2011
Kabupaten Kupang	24.832.201.395,83	31.096.115.135,29	34.391.662,29
Kabupaten TTS	15.615.391.422,89	18.418.112.644,61	28.091.254.466,00
Kabupaten TTU	14.996.262.303,90	13.263.448.270,47	39.278.279.486,65
Kabupaten Belu	22.095.998.629,00	33.447.006.092,00	34.853.047.834,00
Kabupaten Alor	15.328.402.601,00	16.269.417.213,00	21.385.454.835,00
Kabupaten Flores Timur	20.691.978.390,00	16.251.861.009,43	21.304.561.000,00
Kabupaten Sikka	25.790.311.061,62	24.729.402.421,08	30.708.603.692,00
Kabupaten Ende	17.907.712.172,00	18.714.079.408,00	27.225.311.366,00
Kabupaten Ngada	15.729.650.341,91	16.600.407.851,21	26.912.033.980,00
Kabupaten Manggarai	19.453.939.349,00	27.370.417.987,99	32.749.310.197,00
Kabupaten Sumba Barat	22.185.675.365,00	20.821.930.341,07	12.758.179.377,00
Kota Kupang	36.204.733.167,02	36.828.891.454,00	51.500.000.000,00
Kabupaten Lembata	16.014.568.858,80	14.064.877.467,44	-
Kabupaten Rote Ndao	12.076.428.361,79	12.751.901.732,70	16.572.909.111,00
Kabupaten Manggarai Barat	17.402.058.777,00	17.441.407.177,00	23.527.633,9
Kabupaten Nagekeo	9.358.095.116,00	10.349.984.925,00	16.194.138.000,00
Kabupaten Sumba Tengah	7.372.839.836,00	-	13.828.827.102,60
Kabupaten Sumba Barat Daya	9.516.217.604,00	11.843.377.334,00	12.758.179.377,00
Kabupaten Sumba Timur	-	-	31.513.104,00
Kabupaten Manggarai Timur	5.475.549.009,00	8.484.377.334,00	12.868.266.374,00
Kabupaten Sabu Raijua	-	1.481.584.953,04	2.927.740.000,00

Sumber: Biro Keuangan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dari tahun 2009 Kota Kupang merupakan Kota yang menghasilkan kontribusi PAD terbesar, yaitu sebesar Rp.36.204.733.167,02, sedangkan Kabupaten yang menghasilkan kontribusi PAD terkecil adalah Kabupaten Manggarai Timur, sebesar Rp.5.475.549.009,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, kabupaten yang menghasilkan kontribusi PAD terbesar adalah Kota Kupang, sebesar Rp.36.828.891.454,00, sedangkan Kabupaten yang menghasilkan kontribusi PAD terkecil adalah kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp.1.481.584.953,04. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, Kota Kupang masih mendominasi menghasilkan kontribusi PAD sebesar Rp.51.500.00.000,00 sedangkan kabupaten yang menghasilkan kontribusi PAD terkecil adalah kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp.23.527.633,9.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Perbandingan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah Antara Kabupaten dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Perbandingan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perbandingan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur..

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lanjutan, berkaitan dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah antara Kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.